

## **POLITIK PEMBANGUNAN DALAM LOGIKA DEMOKRASI REPRESENTATIF**

(Studi Kasus Pembangunan di Kabupaten Lamongan)

Ahmad Burhan Hakim<sup>1</sup>, Satryo Pringgo Sejati<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Institut Pesantren Sunan Drajat, Indoneisa,

<sup>2</sup> Universitas Papua, Indonesia

*burhanhakim@insud.ac.id<sup>1</sup>, s.sejati@unipa.ac.id<sup>2</sup>*

### **Abstract:**

*Democracy is a political system that is widely used by many countries in the world, including Indonesia. Elections are something that is closely related to democracy. So it has a series of presidential elections, regional head elections and legislative elections. In its development, regional elections have become a magnet that attracts many parties to conduct research. On the basis that there will be good development in a democratic manner with regional elections as an integral part of the regional autonomy system. Thus, there is great hope that the results of the regional elections will create equitable development with the assumption that regional money management will be maximized. It's just that that's not what happened, so we tried to carry out a simple study about development based on representation of support, not because of the needs of the area. This then happened in Lamongan, where there was a development gap, the Pantura area saw more massive development than the development in the South Lamongan area.*

**Keywords:** *Politics, Regional Autonomy, Development*

### **Abstrak:**

*Demokrasi adalah suatu sistem politik yang banyak digunakan oleh banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Pemilu adalah salah satu yang memang lekat dengan demokrasi. Sehingga mempunyai rangkaian berupa pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif. Dalam perkembangannya pilkada menjadi magnet yang menarik banyak pihak untuk melakukan penelitian. Dengan dasar bahwa akan ada pembangunan yang baik secara demokratis dengan adanya pilkada sebagai bagian yang lekat dengan adanya sistem otonomi daerah. Dengan demikian ada harapan besar bahwa hasil dari pilkada tersebut akan menciptakan pembangunan yang merata dengan asumsi bahwa pengelolaan uang daerah menjadi maksimal. Hanya saja yang terjadi tidak demikian maka kami mencoba untuk melakukan studi yang sederhana tentang pembangunan yang berbasis representasi dukungan bukan karena kebutuhan dari daerah tersebut. Hal ini kemudian terjadi di Lamongan bahwa ada ketimpangan pembangunan, wilayah pantura terlihat pembangunannya lebih massif daripada pembangunan yang ada di daerah lamongan selatan.*

**Kata Kunci:** *Politik, Otonomi Daerah, Pembangunan*

## **PENDAHULUAN**

Demokrasi merupakan salah satu sistem yang menjadi rezim politik internasional hari ini, sehingga Indonesia sendiri menerapkan demokrasi sebagai bagian dari sistem dan nilai politik dalam negara. Dalam demokrasi tentu akan memunculkan kontestasi politik yang bernama pemilu (Pemilihan Umum), dalam konteks ini apabila kita berbicara mengenai Indonesia maka ada beberapa opsi dalam pelaksanaan pemilu tersebut. Mulai dari Pileg

(Pemilihan Umum Legislative), Pilpres (Pemilihan Umum Presiden), Pilkada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) baik dari tingkat Kabupaten/Kota hingga Provinsi, bahkan merasuk sampai di tingkat desa dengan nama Pilkades (pemilihan umum kepala desa).<sup>1</sup> Dimana semua itu dilakukan secara langsung dengan menggunakan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku.

Dari semua konteks demokrasi tersebut menjadi Indonesia sebagai negara dengan indeks demokrasi yang tinggi di dunia.<sup>2</sup> Dalam hal ini tentu kita tahu bahwa demokrasi terbagi menjadi dua yakni demokrasi secara substansi dan prosedural. Secara prosedur Indonesia sendiri mampu melaksanakan hal tersebut secara baik walaupun secara tentu ada koreksi dan revisi dalam beberapa hal. Hal yang ingin penulis analisis dalam artikel ini bukan pada pelaksanaan demokrasi tersebut. Namun ada beberapa dampak atau konsekuensi dari pelaksanaan tersebut. Sebut saja demokrasi perwakilan yang menjadi acuan demokrasi kita hari ini yang secara tentu berhubungan dengan pembangunan di wilayah kerja demokrasi tersebut. Semisal pilkada, maka secara tentu ada wilayah atau daerah yang menjadi pusat atau lumbung suara bagi sang pemenang. Maka dengan analisis sederhana sebagai contoh di kabupaten Lamongan, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten tersebut lebih gencar dilakukan di wilayah yang menjadi basis masa bupati yang sekarang menjabat.

Dalam hal ini secara mekanis membuat pembangunan di daerah berjalan secara masif namun tidak merata. Di kabupaten lamongan wilayah yang menjadi target utama pembangunan terfokus pada wilayah Pantai Utara (Pantura), ini menjadi realistis karena pada saat pilkada dilakukan wilayah pantura menjadi salah satu lumbung suara dari bupati yang sekarang menjabat. Sedangkan di wilayah selatan kurang dapat sentuhan pembangunan yang massif. Hal tersebut bisa ditengarai karena wilayah selatan lamongan menjadi basis massa dari rival pilkada yang lalu. Dalam contoh sederhana ini kita bisa melihat bahwa demokrasi perwakilan menjadi faktor penentu dalam pengembangan pembangunan dalam suatu daerah atau wilayah tak terkecuali di Kabupaten Lamongan.<sup>3</sup>

Politik pembangunan yang kami maksud bahwa ada hubungan atau variable penentu suatu pembangunan di daerah atau pun nasional dengan basis keberpihakan politik suatu

---

<sup>1</sup> Simamora, J. (2011). Eksistensi pemilukada dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(1), 221-236.

<sup>2</sup> Rahmatulloh, R. (2019). Wajah Demokrasi Jakarta Dalam Potret Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 18(2), 112-145.

<sup>3</sup> Mutmainah, I., & Cahyono, H. (2021). Strategi Pengembangan Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Kabupaten Lamongan. *Independent: Journal of Economics*, 1(1), 186-204.

komunitas ataupun kelompok masyarakat. Dalam hal ini secara tentu demokrasi menjadi salah satu nilai politik yang berwawasan pada pendekatan perwakilan. Baik dalam pilkada, pilpres maupun pileg. Kita bisa menilai atau melihat bagaimana pembangunan suatu daerah atau bahkan desa sangat ditentukan seberapa besar jumlah perwakilan mereka di kursi dewan ataupun sebagai Bupati, wali kota, gubernur, atau bahkan presiden.<sup>4</sup> Hanya saja kami akan menfokuskan pada suatu kajian politik pembangunan dalam dimensi demokrasi perwakilan di lamongan baik dalam eksekutif maupun legislatif.

Secara umum pembangunan yang ada di kabupaten lamongan akan berkembang seiring dengan adanya wakil mereka baik di dewan maupun di eksekutif. Semisal pernah disinggung sebelumnya bahwa pembangunan di wilayah pantura lamongan sampai wilayah bengawan jero akan lebih baik daripada pembangunan yang ada di lamongan selatan. Hal ini ada indikasi bahwa pada pilkada tahun 2020 lalu mayoritas pendukung Bupati yang jadi sekarang berasal dari wilayah pantura lamongan. Maka pembangunan berupa infrastruktur di Lamongan berupa jalan cukup mulus di wilayah tersebut. Walaupun dalam kondisi tertentu ada campur tangan pemerintah provinsi dalam pembangunan tersebut. Beberapa kanal semisal youtube atau media sosial instagram dan facebook yang ada di lamongan banyak menyoroti kondisi jalan yang ada di wilayah lamongan selatan dalam kondisi yang tidak baik. Hal ini menjadi suatu data yang menghasilkan asumsi bahwa memang pembangunan jalan di Lamongan lebih fokus di pantura daripada wilayah selatan lamongan. Dengan sedikit contoh ini maka asumsi kami jelas bahwa demokrasi perwakilan akan juga punya hubungan erat dengan daerah yang akan dilakukan pembangunan khususnya jalan.

## **METODE**

Dalam artikel sederhana ini kami menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Kami juga melakukan pendekatan metodologi dengan menggunakan kajian pustaka atau library research untuk memudahkan kami dalam melakukan kajian dan mencari sumber-sumber data primer yang kami butuhkan.<sup>5</sup> Selain itu kami juga melakukan pendekatan ilmu berupa ilmu sosial dan ilmu politik sesuai dengan bidang kajian yang sedang kami geluti. Dalam prosesnya penelitian sederhana ini melahirkan hipotesis atau asumsi

---

<sup>4</sup> Anugerah, D. (2011). Marketing Politik: Urgensi dan Posisinya dalam Komunikasi Politik. Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies, 5(18), 575-598.

<sup>5</sup> Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher).hal. 45-47

sementara bahwa politik pembangunan punya hubungan yang erat dengan demokrasi perwakilan yang ada dalam dinamika politik yang sedang berkembang saat ini.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **1. Demokrasi dan Pembangunan**

Demokrasi merupakan tatanan hidup bernegara yang menjadi pilihan negara-negara di dunia pada umumnya. Demokrasi lahir dari tuntutan masyarakat barat akan persamaan hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Hal ini terjadi karena pada masa sebelum adanya deklarasi Amerika dan Perancis, setiap warga dibeda-bedakan kedudukannya baik di depan hukum maupun dalam tatanan social masyarakat.<sup>6</sup> Demokrasi yang berasal dari kata demos dan kratos berarti pemerintahan dari untuk oleh rakyat. Amin Rais<sup>7</sup> mengartikan demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya yang memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah negara oleh karena kebijaksanaannya tersebut menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat. Atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.<sup>8</sup>

Perkembangan konsep demokrasi tidak dapat dilepaskan dari sejarah munculnya deklarasi Kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 dan Perancis tahun 1789. dalam perkembangan konsep demokrasi, tidak dapat dilepaskan dari adanya persamaan hak di depan hukum dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang kemudian berkembang dengan pembagian dan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.<sup>9</sup> Kemudian Demokrasi deliberatif memberikan sorotan tajam mengenai bagaimana prosedur hukum itu dibentuk. Undang-undang, yang diresmikan dalam demokrasi deliberatif, merupakan suatu dialog antara mekanisme legislatif dan diskursus-diskursus, baik formal maupun informal, dalam dinamika masyarakat sipil. Demokrasi deliberatif memberikan ruang di luar kekuasaan administratif negara. Ruang itu merupakan jaringan-jaringan komunikasi publik dalam masyarakat sipil. Terdapat korelasi yang jelas antara

---

<sup>6</sup> Irawan, B. B. (2016). Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. Jurnal ilmiah hukum dan dinamika masyarakat, 5(1).

<sup>7</sup> Amin Rais, Pengantar Dalam Demokrasi dan Proses Politik, LP3ES, Jakarta, 1986 hal. 5

<sup>8</sup> Ibid Irawan, B. B. (2016). Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. Jurnal ilmiah hukum dan dinamika masyarakat, 5(1).

<sup>9</sup> Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1992, hal.19.

gagasan demokrasi dan ide demokrasi deliberatif, yaitu menempatkan masyarakat pada posisi yang emansipatoris untuk melakukan kegiatan legislasi melalui ruang-ruang publik. Ternyata demokrasi perwakilan bukanlah bentuk demokrasi yang murni, melainkan modifikasi dari bentuk kedaulatan rakyat yang paling murni.<sup>10</sup>

Maka dengan banyak pendekatan yang kami kutip diatas bisa dikatakan sebenarnya demokrasi punya nilai politik yang luhur dengan mengedepannya rakyat sebagai garda depan dalam susunan dan bingkai dalam politik. Seharusnya demokrasi menjadi pijakan dasar dalam menjalankan roda pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Dengan demikian cita-cita pasca reformasi yakni otonomi daerah mampu diselenggarakan dengan bersih, transparan dan berkeadilan. Hanya saja secara factual demokrasi membenani biaya yang cukup besar bagi para kontestan pemilu. Hal ini yang kemudian membuat pembangunan suatu daerah akan bergantung pada nilai sumbangan suara dari masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu sehingga hal tersebut tidak mencerminkan keadilan dan keadaban dalam demokrasi kita. Dengan kata lain, sebenarnya hasil pemilihan tersebut adalah suara mayoritas rakyat dan menjadi wajib bagi para eksekutif untuk menjalan pembangunan yang merata dan untuk semua golongan masyarakat. Namun hal tersebut tidak terjadi.

## 2. Pilkada dan Politik Pembangunan Daerah

Sistem perencanaan pembangunan suatu negara biasanya sejalan dengan bentuk negara dan sistem pemerintahannya. pada negara berbentuk federalis, sistem perencanaan pembangunannya cenderung bersifat bottom up, karena sumber kekuasaan dan sumber keuangannya berada di tangan pemerintah negara bagian. Selanjutnya pada negara unitaris, sistem perencanaan pembangunannya cenderung bersifat *top down* karena memang di negara unitaris sumber kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat. Namun pada negara unitaris yang berdesentralisasi sistem perencanaan pembangunannya bersifat eklektif yakni perpaduan antara top down dengan bottom up dengan gradasi yang bervariasi, tergantung pada derajat desentralisasinya.<sup>11</sup>

Setelah gerakan reformasi pemerintahan tahun 1998, yang menumbangkan rezim orde baru, bandul sistem pemerintahan Indonesia beralih dari sistem sentralistik menjadi

---

<sup>10</sup> Op. cit Irawan, B. B. (2016). Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. Jurnal ilmiah hukum dan dinamika masyarakat, 5(1).

<sup>11</sup> Aser, F. (2016). HUBUNGAN PILKADA SERENTAK DAN SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN ANTAR PEMERINTAH DAERAH (Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah Beralih dari Logika Sektoral Menuju Logika Kewilayahan). Jurnal Politikologi, 19-26.

sistem pemerintahan desentralistik dengan otonomi seluas-luasnya.<sup>12</sup> Banyak hal mengalami perubahan dalam sistem ketatanegaraan dimana peran pemerintah daerah diperkuat dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah. Sisi lainnya pemerintah pusat tidak lagi menjadi aktor utama dalam menentukan arah pembangunan di daerah. Daerah-daerah mulai berani menjalankan pembangunannya dengan semangat inovasi dan otonomi daerahnya. Akibat tuntutan daerah dalam semangat reformasi tersebut maka lahir beberapa regulasi yang mengakomodasi kepentingan pemerintah pusat dan kebutuhan daerah.<sup>13</sup>

Indonesia melakukan pilkada secara langsung sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menggantikan pemilihan kepala daerah melalui sistem perwakilan melalui DPRD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang tersebut merupakan penjabaran yang diamanatkan dari ketentuan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 untuk melaksanakan pilkada secara langsung. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 itu berbunyi: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis".<sup>14</sup>

Untuk maju dalam pilkada sendiri terdapat dua cara. Yaitu melalui jalur partai politik atau jalur independen. Dari dua jalur tersebut, banyak para bakal calon kepala daerah lebih memilih untuk maju melalui partai politik. Hal ini karena tidak mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi untuk maju melalui jalur independen. Ketika melalui jalur partai politik, para bakal calon harus bertarung untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik yang dilamar. Rekomendasi parrpol sendiri dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai sedangkan fungsi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di daerah hanya sekedar menjaring atau melaksanakan fit and proper test.<sup>15</sup>

Otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara demokratis memanglah penting untuk mewujudkan kesejahteraan umum di daerah. Dengan adanya otonomi daerah, daerah lebih total dalam melaksanakan pembangunan di daerah, meningkatkan pendapatan daerah, serta meningkatkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat di daerah.

---

<sup>12</sup> Seymour, R., & Turner, S. (2002). Otonomi daerah: Indonesia's decentralisation experiment. *New Zealand Journal of Asian Studies*, 4, 33-51.

<sup>13</sup> Op. cit Aser, F. (2016). HUBUNGAN PILKADA SERENTAK DAN SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN ANTAR PEMERINTAH DAERAH (Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah Beralih dari Logika Sektoral Menuju Logika Kewilayahan). *Jurnal Politikologi*, 19-26.

<sup>14</sup> Ibadurrahman, I. (2021). Implementasi dan Dampak Politik Transaksional (Mahar Politik) Dalam Pilkada Terhadap Pembangunan di Daerah. *Lex Renaissance*, 6(4), 770-780.

<sup>15</sup> Ibid Ibadurrahman, I. (2021). Implementasi dan Dampak Politik Transaksional (Mahar Politik) Dalam Pilkada Terhadap Pembangunan di Daerah. *Lex Renaissance*, 6(4), 770-780.

Dengan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah yang demokratis, akan memberikan kesempatan kepada masyarakat daerah untuk menentukan siapa calon kepala daerah yang dinilai mampu untuk membawa kemajuan di daerahnya.<sup>16</sup> Pilkada menjadi salah satu ajang politik yang banyak ditunggu oleh masyarakat tak terkecuali masyarakat di wilayah lamongan. Ketepilihan seorang bupati dan wakil bupati dengan mekanisme pemilu langsung merupakan suatu kemajuan yang luar biasa. Hanya saja tetap ada pembangunan yang menjadi prioritas bagi para bupati untuk dilakukan. Seperti yang kami jelaskan di awal bahwa terjadi ketimpangan antara pembangunan wilayah selatan dan utara di kabupaten lamongan. Bisa jadi memang kawasan pantura lamongan memang disiapkan untuk menjadi pusat industri namun kami melihat bahwa hal tersebut seperti alasan klise yang sepertinya di buat-buat.

Mayoritas pemilih pantura lamongan memilih bupati yang sekarang menjabat. Sedangkan wilayah selatan mayoritas adalah pemilih untuk pesaing dalam pilkada 2020 yang lalu. Angkanya bisa sampai 60% persen lebih di tiap-tiap wilayah baik pantura maupun lamongan selatan. Dengan demikian pembangunan di lamongan akan fokus di pantai utara lantaran mayoritas mereka adalah pendukung bupati yang saat ini menjabat. Dengan kata lain bahwa pejabat tersebut mungkin sudah melakukan kontrak politik dengan pemilih sehingga wilayah penduduknya mayoritas dari pantura. Begitupun wilayah bengawan jero yang juga secara mayoritas memilih bupati yang sekarang menjabat. Secara marketing politik hal ini mungkin agak benar adanya, namun secara nilai dan asas pembangunan dalam politik dan demokrasi tentu hal tersebut tidak benar. Maka sejatinya demokrasi dan pembangunan yang ada di wilayah lamongan lebih mengedepankan wilayah basis dukungan bukan pada pemetaan kebutuhan untuk melakukan pembangunan.

## **KESIMPULAN**

Dari keseluruhan penjelasan diatas bisa diambil kesimpulan yang sederhana bahwa demokrasi yang kita yakini hari ini tidaklah suatu konsep atau nilai yang baik. Namun secara praktek lapangan ditemukan banyak ketimpangan salah satunya yakni pembangunan khususnya pembangunan infrastuktur berupa jalan. Dengan demikian demokrasi representatif akan menimbulkan pembangunan yang representatif pula. Hal ini kemudian

---

<sup>16</sup> Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, Eka NAM Sihombing, "Relasi Aspek Sosial dan Budaya Dengan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20 No.02, 2020, hlm. 207

akan dikuatkan dengan kenyataan bahwa pembangunan tidak bersifat berkeadilan yang ditentukan dimana wilayah tersebut menjadi lumbung dukungan mayoritas bagi paslon dalam pilkada khususnya Pilkada yang terjadi di lamongan pada tahun 2020 silam. Pembangunan yang berjalan lebih fokus pada wilayah pantura lamongan dan sebagian bengawan jero. Dimana lokal wilayah tersebut adalah mayoritas pendukung bupati yang sekarang menjabat. Disukai atau tidak pembangunan yang ada dilamongan dilakukan dengan menggunakan pendekatan basis masa dukungan dan bukan pada basis keadilan dan kebutuhan. Walaupun konsep Jamula (jalan mulus lamongan) mulai berjalan sejak tahun 2021 kemaren.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amin Rais. *Pengantar dalam Demokrasi dan Proses Politik*. LP3ES, Jakarta, 1986 hal. 5
- Anggito, A., & Setiawan, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Anugerah, D. Marketing Politik: Urgensi dan Posisinya dalam Komunikasi Politik. Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies, 5(18), 2011.
- Aser, F. Hubungan Pilkada Serentak dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Antar Pemerintah Daerah (Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah Beralih dari Logika Sektoral Menuju Logika Kewilayahan). *Jurnal Politikologi*, 2016.
- Ibadurrahman, I. Implementasi dan Dampak Politik Transaksional (Mahar Politik) Dalam Pilkada Terhadap Pembangunan di Daerah. *Lex Renaissance*, 6(4), 2021.
- Irawan, B. B. Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. *Jurnal ilmiah hukum dan dinamika masyarakat*, 5(1), 2016.
- Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, Eka NAM Sihombing, “Relasi Aspek Sosial dan Budaya Dengan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No.02, 2020.
- Mutmainah, I., & Cahyono, H. Strategi Pengembangan Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Kabupaten Lamongan. *Independent: Journal of Economics*, 1(1), 2021.
- Rahmatulloh, R. Wajah Demokrasi Jakarta Dalam Potret Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 18(2), 2019.
- Seymour, R., & Turner, S. Otonomi daerah: Indonesia's decentralisation experiment. *New Zealand Journal of Asian Studies*, 4, 2002.
- Simamora, J. Eksistensi pemilukada dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(1), 2011.

**POLITIK PEMBANGUNAN DALAM LOGIKA DEMOKRASI REPRESENTATIF**

(Studi Kasus Pembangunan di Kabupaten Lamongan)

Ahmad Burhan Hakim, Satryo Pringgo Sejati

Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.